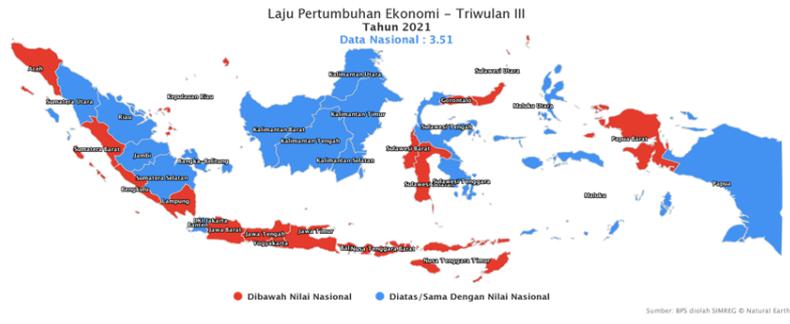


BAB I PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak terhadap banyak sektor. Selain berdampak pada sektor kesehatan, sektor lain yang memiliki dampak signifikan adalah sektor ekonomi. Aktivitas yang ada pada sektor ekonomi adalah investasi, produksi, *output*, pendapatan, hingga ketenagakerjaan. Pemerintah merancang dan menerapkan sejumlah kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian Covid-19 dan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi. Rencana yang dibuat ditingkat nasional kemudian disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah. Dalam klasifikasi sektor produksi, misalnya sektor industri, berperan sebagai kontribusi utama perekonomian di Indonesia untuk mencapai pertumbuhan nasional yang lebih berkelanjutan (Bappenas, 2020). Implementasi dari rencana pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan dengan menjalani peninjauan, pendampingan dan pengawalan investasi pada sektor prioritas, pengembangan kawasan industri terintegrasi, implementasi kebijakan pengembangan Industri 4.0 pada sektor prioritas, dan pengembangan dan pendampingan industri secara komprehensif (Bapennas, 2021).

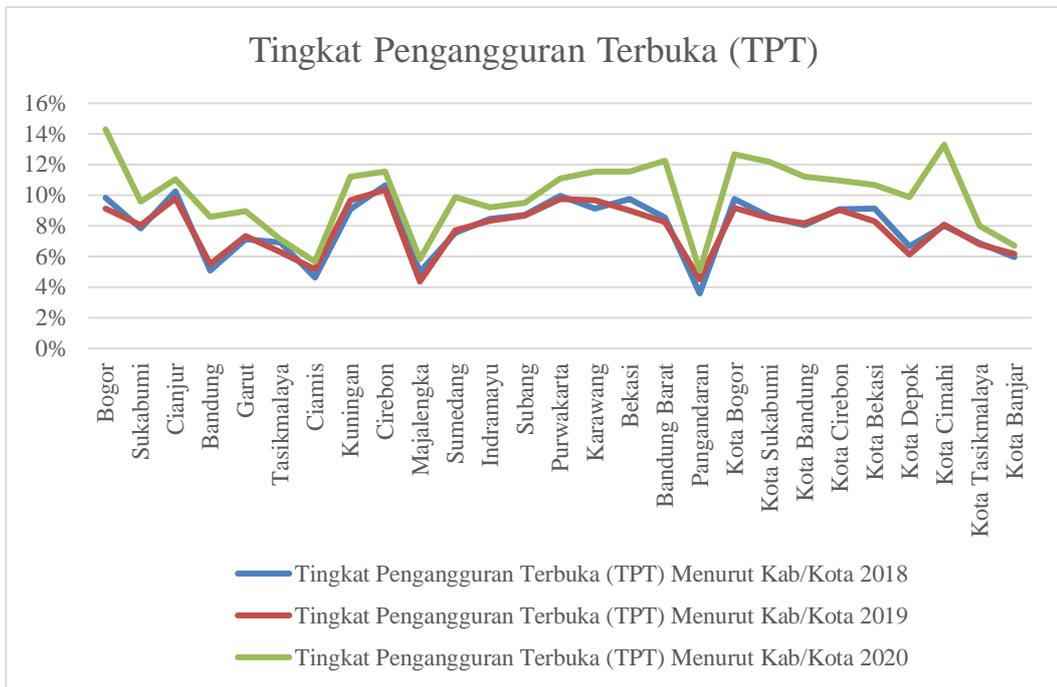
Meski Provinsi Jawa Barat tidak masuk pengembangan Kawasan Industri (KI) prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Menurut PDRB 2019, Jawa Barat menopang ekonomi Indonesia sebesar 13,42%. Jawa Barat juga menopang 17% kontributor tertinggi realisasi investasi, 20,8% kontributor tertinggi terhadap realisasi investasi penanaman modal asing nasional, 28,3% kontributor tertinggi terhadap PDB nasional sektor industri manufaktur dan 17,85% kontributor tertinggi ekspor nasional. Sementara itu, berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) di tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II Tahun 2021, Jawa Barat berada di bawah nilai Nasional sebesar 3,45 dibandingkan dengan nilai nasional yakni 3,51.



Gambar I. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan III Tahun 2021

Sumber: (BPS, 2021)

Selain laju pertumbuhan ekonomi perbaikan ekonomi Jawa Barat sejak triwulan III 2020 juga belum cukup kuat untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat seperti sediakala. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat masih cukup tinggi yakni sebesar 8,9. Angka tersebut belum memotret perbaikan kondisi ekonomi yang terjadi di Jawa Barat sejak akhir tahun 2020 hingga triwulan I 2021 (Bank Indonesia, 2021).



Gambar I. 2 Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2020

Sumber: (BPS Jabar, 2021)

Grafik di atas menjelaskan mengenai kondisi tingkat pengangguran terbuka atau bisa disebut persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Jawa Barat tahun 2018 hingga 2020. Meninjau dari persentase setiap kota/kabupaten, diketahui pada tahun 2020 memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan 2018 dan 2019. Hal ini menjadi bukti adanya isu ketenagakerjaan di tengah pandemi Covid-19.

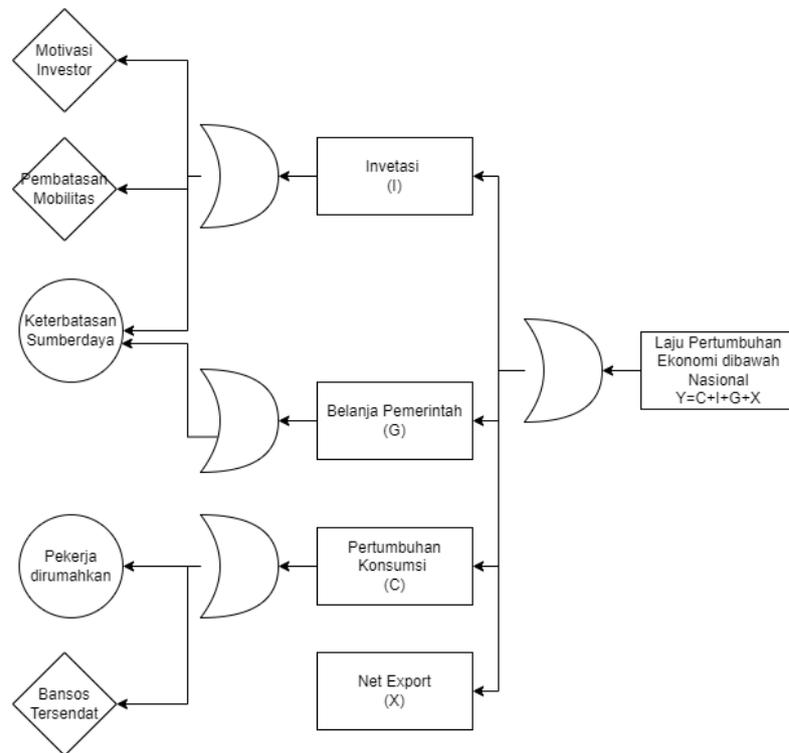
Dari sisi lapangan usaha, beberapa sektor terus melanjutkan perbaikan seperti perdagangan, pertanian, konstruksi, dan lainnya. Namun demikian, perbaikan permintaan global dan domestik belum cukup mendorong kinerja sektor industri pengolahan yang justru mengalami kontraksi yang lebih dalam (Bank Indonesia, 2021). Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang terjadi pada beberapa sektor pada sektor perekonomian.

Pembangunan wilayah selain meningkatkan daya saing wilayah juga mengupayakan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensinya masing-masing. Indikator utama yang menjadi prioritas pembangunan wilayah meliputi pemulihan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran dapat menjadi capaian pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Pandemi Covid-19 mengharuskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan *refocusing* dan realokasi Anggaran. Hal ini mengakibatkan tidak optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Tahun 2020. Dengan demikian, isu strategis yang mengemuka pada tahun rencana 2021 dan 2022 adalah pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 (Bappenda Jawa Barat, 2021)

Dalam merumuskan suatu kebijakan pemulihan ekonomi, pengambil kebijakan harus memprioritaskan pembangunan pada sektor tertentu, mempertimbangkan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Maka, pemilihan sektor prioritas menjadi penting karena keterbatasan tersebut. Hal tersebut adalah implementasi dari prinsip teknik industri karena mencakup bidang desain, perbaikan, dan dipergunakan dari sistem integral yang terdiri dari manusia, bahan-bahan, informasi, peralatan, dan energi.

I. 2 Alternatif Solusi

Permasalahan pada penelitian ini merupakan permasalahan yang kompleks. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa alternatif solusi dari permasalahan. Alternatif solusi dapat dibangkitkan dengan melakukan identifikasi akar masalah. Penjelasan mengenai mengenai metode *Fault Tree Analysis* (FTA) tertera pada Tabel II.4 Simbol *Fault Tree*. Berikut merupakan hasil penyusunan diagram FTA:



Gambar I. 3 Diagram *Fault Tree Analysis*

Interpretasi Gambar I. 3 Diagram *Fault Tree Analysis* menggambarkan pembangkit akar masalah. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat merupakan *top event* pada sistem yang merupakan rumus dari laju pertumbuhan ekonomi (Y). Interpretasi *logic event or (Gate)* menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di bawah nasional dipengaruhi oleh investasi (I) yang melambat atau konsumsi (C) yang tertahan, pengeluaran pemerintah (G), dan *net export* (X). Pada *top event* investasi, terdapat *logic event or (Gate)*, artinya melambatnya investasi dipengaruhi oleh beberapa *basic event* yaitu keterbatasan sumberdaya atau *undeveloped event* yaitu motivasi investor dan pembatasan mobilitas. Interpretasi

lainnya pada *top event* investasi adalah salah satu diantara event bisa mempengaruhi investasi. Pada *top event* konsumsi dipengaruhi oleh beberapa *basic event* yaitu pekerja dirumahkan dan *undeveloped event* bansos tersendat dan pembatasan mobilitas. Pada *top event* pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh *basic event* yaitu keterbatasan sumberdaya.

Pada tugas akhir ini variabel *net export* tidak dilakukan pengkajian lebih dalam karena diasumsikan *event* tersebut merupakan faktor diluar sistem (*exogenous*). Selanjutnya hal tersebut dikuatkan dengan kebutuhan data berupa Tabel *Input Output* transaksi domestik atas dasar harga produsen pada bagian II.1.2 Tabel *Input Output*. Menurut (Sahara, 2017) pada transaksi domestik atas dasar harga produsen, transaksinya tidak lagi mencangkup barang dan jasa impor.

Berikut merupakan alternatif solusi sebagai potensi solusi yang akan diselesaikan

Tabel I. 1 Akar Masalah dan Potensi Solusi

No	Akar Masalah	Dasar Pertimbangan	Potensi Solusi
1	Bansos Tersendat	Program bantuan sosial tidak cukup banyak membantu menaikkan konsumsi rumah tangga karena penerimaan terhambat dan terdapat pengurangan target sasaran penerima insentif. (Ahmad, 2021)	Perancangan perbaikan sistem distribusi bantuan sosial
2	Pembatasan Mobilitas	Program PPKM Darurat Jawa Bali dinilai memiliki dampak diberbagai sektor, seperti di sektor kesehatan angka <i>Bed Occupancy Rate</i> (BOR) menurun dan juga dari sektor ekonomi yang memiliki penurunan pendapatan perkapita. Pemerintah harus membuat gerakan untuk menaikkan pendapatan masyarakat khususnya sektor ekonomi informal. (Humas DPRD Jawa Barat, 2022)	Perancangan digitalisasi UMKM
3	Pekerja dirumahkan	Memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan industri yang bersifat padat karya. Pertimbangan lainnya adalah pembatasan sosial yang masih diberlakukan.	Perancangan penentuan berbasis penyerapan tenaga kerja.
4	Motivasi Investor	Perlu ada dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi untuk membangkitkan konsumsi rumah tangga. (Panjaitan, 2020)	Perancangan roadmap sektor prioritas dengan keterkaitan
5	Keterbatasan sumberdaya	Apabila ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan ekonomi harus diutamakan pada sektor yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor hulu dan hilirnya karena keterkaitan antar sektor dapat berimplikasi pada keseluruhan pertumbuhan ekonomi (Sahara, 2017)	yang kuat dengan sektor lainnya.

Pada Gambar I.4 bansos berkontribusi dalam pemulihan ekonomi yang bersumber dari pemulihan konsumsi rumah tangga yang meningkat karena searah dengan membaiknya aktivitas ekonomi yang turut mendorong kenaikan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selama ini bantuan sosial pandemi Covid-19 menjaga daya beli masyarakat kelompok bawah.



Gambar I. 4 Model Bantuan Sosial Terhadap Konsumsi

Meskipun berdasarkan model di atas bantuan secara langsung akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga, namun kebijakan tersebut tidak bisa mempengaruhi ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan bantuan sosial dinilai hanya menyelesaikan permasalahan hilir. Dalam merumuskan suatu kebijakan, penentuan kebijakan harus memprioritaskan pembangunan pada sektor tertentu dengan mempertimbangan adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.

Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik (Bappenda Kabupaten Buleleng, 2017).

Melalui *thesis* (Farikha, 2017) berjudul *Penyusunan Roadmap Berbasis Sektor Unggulan dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo* terdapat keterkaitan yang spesifik antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan wilayah dimana dengan adanya perekonomian yang baik akan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan pelayanan masyarakat, memperkecil tingkat pengangguran, meningkatkan kekayaan daerah,

dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wilayah studi pada *thesis* tersebut meliputi Kabupaten Sidoarjo dimana sejak Tahun 2013 mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Maka, diperlukan perumusan kebijakan perekonomian yang tertuang dalam suatu *roadmap* secara berkelanjutan dengan tahapan penelitian berupa identifikasi sektor prioritas, perumusan model pertumbuhan ekonomi, perumusan strategi, penentuan prioritas strategi, dan penyusunan *roadmap* itu sendiri. Hasil penelitian menggunakan *LQ* dan *Shift Share* sektor unggulan di Kabupaten Sidoarjo adalah sektor industri pengolahan.

Melalui dasar tersebut penyusunan *roadmap* pemulihan ekonomi menjadi pertimbangan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Covid-19. *Roadmap* berisi sektor prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan keterkaitan yang kuat pada satu sektor dengan sektor lainnya. Penyusunan *roadmap* juga dapat mempertimbangkan penyerapan tenaga kerja.

I. 3 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis pembangkit akar masalah dan alternatif solusi di atas tugas akhir ini memiliki beberapa rumusan permasalahan yang menjadi fokus tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis keterkaitan sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana rancangan *roadmap* pengembangan sektor prioritas Provinsi Jawa Barat?

I. 4 Tujuan Tugas Akhir

Melalui fokus tugas akhir yang telah dipaparkan, tulisan ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis keterkaitan antar sektor pada sektor ekonomi Provinsi Jawa Barat.
2. Merancang *roadmap* pengembangan sektor prioritas Provinsi Jawa Barat.

I. 5 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat.
2. Sebagai masukan pertimbangan investor melalui aktivitas investasi.

I. 6 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir:

Bab I Pendahuluan	:	Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II Landasan Teori	:	Bab ini berisi teori yang relevan terhadap tugas akhir. Teori tersebut adalah Pengantar Ilmu Ekonomi, Sistem Pendukung Keputusan, Matriks dan Sistem Persamaan Linier, dan Teori <i>Tabel Input Output</i> . Setelah itu terdapat pemilihan model dan kerangka perancangan berdasarkan teori yang telah dikumpulkan.
Bab III Metodologi Perancangan	:	Bab ini berisi tentang sistematika perancangan yang terbagi menjadi empat tahap yaitu, pendahuluan, perancangan, verifikasi, dan validasi. Bab ini juga menjelaskan mengenai batasan dan asumsi tugas akhir.
Bab IV Perancangan Sistem Terintegrasi	:	Bab ini berisi tentang deskripsi data dan pembahasan detail mengenai proses perancangan hingga pembahasan hasil rancangan.
Bab V Validasi Evaluasi Hasil Rancangan	:	Bab ini berisi tentang validasi hasil rancangan, evaluasi hasil rancangan, dan analisis rencana implementasi hasil rancangan.
Bab VI Kesimpulan Saran	:	Bab ini berisi kesimpulan dan saran rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.